

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Perdagangan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pasar Tradisional Tanpa Bangunan/Tenda yang dikelola Swasta

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Pasar Tradisional Tanpa Bangunan/Tenda yang dikelola Swasta adalah banyaknya tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksinya tanpa bangunan atau tenda.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

## **RUJUKAN**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksinya tanpa bangunan atau tenda.

## **INTERPRETASI**

Jumlah pasar tradisional tanpa bangunan/tenda yang dikelola swasta menunjukkan banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang

dan/atau jasa dimana konstruksinya tanpa bangunan atau tenda.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

**DOKUMEN**

SIPD

